



KKR Targetkan Raih WTP

Latih Aparatur Kelola Keuangan dan Aset

KUBU RAYA, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan bisa mendapat prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan dan laporan keuangan daerah.

Sebab, selama ini laporan pengelolaan keuangan dari BPK hanya mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Selama ini Kubu Raya mendapat predikat WDP. Kita akan berupaya untuk mencapai WTP," kata Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus, Kamis (12/2).

Menurutnya, banyak aspek positif yang akan didapat, jika suatu daerah bisa meraih penilaian dengan predikat WTP, mandakan pemerintah daerah baik dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu juga ada bonus yang akan didapatkan oleh pemerintah sekitar Rp 30 miliar.

"Selain itu, nilai positif yang didapatkan dari predikat WTP juga ada bonus-bonus lainnya dalam kaitan dengan program-program dari pusat yang akan mengucur ke daerah. Yang jelas ini merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi pemerintah daerah. Bagaimanapun caranya supaya pengelolaan keuangan daerah, harus lebih

baik," tambahnya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, lanjut Hermanus, akan merencanakan biaya penyediaan anggaran pemerintahan daerah. Untuk mendapatkan predikat WTP itu, pihaknya berupaya maksimal runting bersama seluruh jajaran SKPD di lingkungan pemerintahan Kubu Raya.

"Tahun 2014 lalu kita sudah melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan Bimbingan teknis kepada pimpinan SKPD terutama pada kelemahan-kelemahan kita selama ini," ujarnya.

Bimbingan teknis yang diberikan diantaranya penataan aset. Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap aparatur untuk penataan aset, dan menindaklanjuti temuan dari hasil pemeriksaan

pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten. Ada banyak faktor yang menjadi penilaian dari BPK kepada pemkab terhadap pengelolaan yang berupa keuangan.

"Kita berharap seluruh SKPD di Kubu Raya dapat memaksimalkan anggaran yang telah di kurcikan melalui program-program yang telah diakukan, sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal, serta dapat membuat bentuk pelaporan dengan baik," ujarnya.

la juga berharap dengan telah difanda tangani pakta intergritas oleh pimpinan SKPD dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. (dan)

HERMANUS

Wakil Bupati Kubu Raya

keuangan oleh BPK. "Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan target WTP bisa teralisasi di tahun 2015," tambahnya.

WTP ini bisa diraih, sebab, pemerintah beberapa hari yang lalu telah melakukan pendataan pakta integritas terhadap seluruh pimpinan jabatan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendataan fakta integritas, dimaksudkan mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Karena, kinerja mereka berkaitan langsung dengan target meraih opini WTP.

"Dengan pakta integritas yang sudah dianda tangani oleh pimpinan SKPD dapat terorgan pola pikir yang sama serta dibarengi dengan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja," imbuhnya.

Fakta integritas, lanjut dia dapat memberikan motivasi kerja bagi seluruh SKPD dan jajarannya supaya bekerja lebih serius dengan mengutamakan hasil dari pembangunan. Bukan hanya sekadar untuk menghabiskan anggaran semata.

"Program yang telah dirancang oleh SKPD tersebut untuk berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta hasilnya juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang baik dan pelaksanaan yang baik serta pelaporan yang baik tentu hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan," tukasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dr Berli Hamdani berkomitmen melaksanakan program terbit administrasi, terbit anggaran dan terbit laporan keuangan serta menajalkannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (dan)

Maksimalkan Anggaran

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Ir Usman mengatakan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya dengan membuat pakta integritas kepada seluruh pimpinan SKPD dalam rangka membangun komitmen bersama untuk memaksimalkan WTP dari Badan Penyelenggara Keuangan.

"Pada tahun 2014 Kubu Raya belum bisa meraih WTP karena masih belum selesai penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Pontianak ke Pemkab Kubu Raya, sehingga menyebabkan penilaian opini pada tahun 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujarnya.

la mengatakan pihaknya tentu akan terus melakukan